

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Jakarta.akurat.co
Media Cetak	

Jamin Akses Pendidikan Bagi Semua Warga, Bang Zaki Dorong Pemprov DKI Jakarta Wujudkan Sekolah Gratis untuk Swasta

M Rahman Akurat

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) menemui banyak masalah dalam aplikasinya, seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata.

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji kebijakan KJP dan menggantinya dengan program [sekolah gratis](#).

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar atau akrab disapa [Bang Zaki](#), turut mendukung usulan program sekolah gratis tersebut.

Menurut Bang Zaki, usulan program sekolah gratis sebagai pengganti program KJP tersebut perlu ditindaklanjuti, untuk memberikan hak pendidikan secara merata kepada masyarakat.

"Program sekolah gratis ini menjadi solusi yang tepat dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu," ungkap Bang Zaki dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Maret 2024.

Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta ini pun menyoroti program KJP Plus yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.

Banyak siswa dari keluarga tidak mampu masih kesulitan memperoleh manfaat dari program tersebut. Sebaliknya, ada anak dari keluarga mampu yang justru mendapat KJP.

"Kami melihat KJP harus diarahkan lebih visioner lagi, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta," terangnya.

Pasalnya, saat ini meskipun anak sekolah swasta mendapat KJP, tak jarang sekolah swasta tiba-tiba menaikkan tarif biayanya. Lantas mereka tidak bisa membayar dan kemungkinan terburuknya adalah putus sekolah.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022 tercatat sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah.

"Jika kenaikan SPP menghambat akses mereka ke pendidikan, maka langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah ini," terang pria yang pernah menjabat Bupati Tangerang dua periode ini.

Adapun Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk program KJP tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang program KJP Plus untuk menciptakan program sekolah gratis, khususnya di sekolah swasta.

"Dalam situasi dimana biaya pendidikan semakin membebani, kita harus mengupayakan solusi yang memastikan setiap anak dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial," jelas Bang Zaki.

Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga perlu segera melakukan pembahasan untuk program makan siang gratis untuk jenjang SD-SMP.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang baru dalam mengentaskan kasus stunting dan juga demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Pemberian makan siang gratis bagi anak-anak kita tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tapi juga meningkatkan kesejahteraan dan konsentrasi belajar mereka," tutupnya. (*)